

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian sejenis dilakukan oleh (Nofan, M, 2006:67) dengan judul perlindungan hukum terhadap wajib pajak dalam melakukan pendaftaran dengan sistem elektronik registration studi dilakukan pada Direktorat Jendral Pajak DKI Jakarta.

Pada Penelitian tersebut membahas dan mengkaji tentang studi deskriptif kualitatif dengan hasil penelitian yang dilakukan di Direktorat Jendral Pajak (selanjutnya disingkat DJP) di Jakarta. Ditemukan berbagai terobosan terkait dengan aplikasi teknologi informatika dalam kegiatan perpajakan terus dilakukan oleh Dirjen Pajak.

Terobosan penggunaan sarana elektronik ini tidak lain sebagai bagian dari reformasi perpajakan, khususnya administrasi perpajakan. Bagi wajib pajak, model pelayanan tersebut juga memberikan keuntungan yaitu dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja, termasuk pada hari libur.

Penelitian sejenis dilakukan oleh (Azizah, Nur, 2014:15) dengan judul pengaruh penerapan teknologi informasi (e-system) terhadap kepatuhan wajib pajak studi dilakukan pada KPP Madya Malang.

Wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan,

wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha wajib pajak, dan kepada wajib pajak diberikan NPWP.

Pada penelitian tersebut membahas tentang teknologi informasi dimana masyarakat dimudahkan untuk mendaftarkan npwp dan melihat informasi terbaru dari kantor pelayanan pajak dimanapun dan kapanpun melalui akses internet.

Penelitian saat ini membahas tentang *E-REGISTRATION* bagaimana masyarakat dapat mengetahui bagaimana cara mendaftarkan npwp online agar lebih mudah diakses dimanapun karena berbasis internet dan lebih mudah untuk dipergunakan dengan cara ini dapat lebih efisien waktu tidak lagi berulang-ulang untuk ke kantor pajak terdekat.

B. Landasan Teori

1. Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Menurut pasal 1 angka 6 Undang-Undang KUP (Undang-undang nomor 6 Tahun 1983 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007) Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

Menurut Valentina Sri Sumardiyanti, SE., MSi. Aji Suryo, SE., MM. Nomor Pokok Wajib Pajak adalah suatu sarana dalam ministrasi

perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal atau identifikasi wajib pajak. Sebelum memenuhi kewajiban dalam perpajakan wajib pajak harus sudah memiliki (NPWP).

Secara sederhana Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dapat diartikan sebagai nomor yang diberikan kepada wajib pajak (WP) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dan dapat dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

2. Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Menurut Valentina Sri Sumardiyanti, SE., MSi. Aji Suryo, SE., MM.

Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak

- a. Mengetahui identitas wajib pajak. Dengan mempunyai NPWP berarti wajib pajak telah terdaftar di Dirjen Pajak.
- b. Guna memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakan (misal: menetapkan sendiri, menyeter, melaporkan, memungut).
- c. Guna mendapatkan pelayanan dari instansi tertentu (misal: Kantor Perbendaharaan Negara, Izin Usaha, Kantor Imigrasi, Cukai).
- d. Meminta surat pemberitahuan tahunan (SPT)
- e. Menjaga ketertiban dalam membayar pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

3. Pengertian *E-registration*

E-registration adalah sistem pendaftaran, perubahan data wajib pajak atau pengukuhan dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak melalui sistem yang terhubung langsung secara online dengan Direktorat Jendral Pajak. Sistem pendaftaran wajib pajak secara online ini merupakan sistem aplikasi sebagai bagian dari sistem informasi perpajakan di lingkungan kantor DJP dengan berbasis perangkat keras dan perangkat lunak yang dihubungkan oleh perangkat komunikasi data yang digunakan untuk mengelola proses pendaftaran wajib pajak (Surini, 2016:38).

Sistem ini terbagi menjadi dua yaitu yang pertama sistem yang digunakan oleh wajib pajak yang berfungsi sebagai sarana pendaftaran wajib pajak secara online dan kedua sistem yang digunakan oleh petugas pajak yang berfungsi untuk memproses pendaftaran wajib pajak.

Secara sederhana dapat diartikan sebagai berikut *e-registration* yaitu suatu sarana elektronik yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk mendaftarkan npwp secara online dan dapat dilakukan dimanapun berada dan hari libur dapat diakses oleh wajib pajak yang ingin mendaftarkan diri untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak.

4. Pengertian Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

5. Wajib Pajak

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

6. Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, kopaerasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, oer organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

7. Masa Pajak

Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung menyeter, dan melaporkan pajak yang terhutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam undang-undang KUP. Masa Pajak sama dengan 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga) bulan kalender.

8. Tahun Pajak

Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

9. Bagian Tahun Pajak

Bagian tahun pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak.

10. Pajak Yang Terhutang

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

11. Penghapusan NPWP

Penghapusan NPWP adalah tindakan menghapus NPWP dari administrasi Kantor Pelayanan Pajak. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan oleh Direktur Jendral Pajak apabila :

- a. Wajib pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. Wajib badan dalam rangka likuidasi atau pembubaran karena penghentian atau penggabungan usaha.
- c. Wanita yang sebelumnya memiliki NPWP dan menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan.
- d. Wajib pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia; atau
- e. Dianggap perlu oleh Direktur Jendral Pajak untuk menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak dari wajib pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.